



STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM PROGRAM PEMBERDAYAAN RUKUN WARGA (P2RW) DI KELURAHAN BAROS KOTA SUKABUMI

Aditya Rizkiandi¹⁾

1) Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Jenderal Achmad Yani, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini berjudul "Strategi Pemerintah Daerah dalam Program Pemberdayaan Rukun Warga (P2RW) di Kelurahan Baros Kota Sukabumi". Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis strategi yang diterapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Rukun Warga (P2RW) di Kelurahan Baros, Kota Sukabumi. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan program serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka, studi lapangan, observasi, dan wawancara dengan informan yang berasal dari Subbag Perencanaan, Bidang Data Bangunan, Jasa Konstruksi, serta Bidang Perumahan dan Permukiman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang dijalankan oleh Dinas PUPR dalam program ini sudah berjalan efektif dan efisien. Dilihat dari tujuan yang jelas, dukungan lingkungan yang mendukung, arah kebijakan yang tepat, serta tindakan yang sesuai, program P2RW telah mencapai hasil yang optimal. Program ini telah berhasil diterapkan dengan baik di lapangan, meskipun terdapat beberapa hambatan yang dihadapi, seperti kurangnya sumber daya manusia dan anggaran yang terbatas. Namun, antisipasi yang dilakukan oleh pihak dinas, seperti peningkatan kapasitas masyarakat dan kolaborasi dengan pihak terkait, telah efektif dalam mengatasi permasalahan tersebut. Secara keseluruhan, penerapan strategi pemberdayaan di Kelurahan Baros telah memberikan dampak positif dalam meningkatkan kualitas kehidupan warga serta memperkuat rasa kebersamaan di masyarakat.

Kata Kunci: Strategi Pemerintah Daerah, Pemberdayaan Rukun Warga, Program P2RW, Kota Sukabumi.

Abstract

This study is titled "Local Government Strategy in the Rukun Warga Empowerment Program (P2RW) in Baros Village, Sukabumi City". The purpose of this research is to describe and analyze the strategy implemented by the Public Works and Housing Agency (PUPR) in carrying out the Rukun Warga Empowerment Program (P2RW) in Baros Village, Sukabumi City. Additionally, this study aims to identify the obstacles faced during the implementation of the program and the efforts made to overcome these challenges. The research method used is descriptive qualitative, with data collection techniques through literature study, field study, observation, and

interviews with informants from the Planning Subsection, Building Data and Construction Services Division, and Housing and Settlement Division. The findings indicate that the strategies employed by the PUPR agency in this program have been effective and efficient. In terms of clear objectives, a supportive environment, appropriate policy direction, and relevant actions, the P2RW program has achieved optimal results. The program has been successfully implemented, although there were some obstacles such as limited human resources and budget constraints. However, anticipatory measures taken by the agency, such as capacity building for the community and collaboration with related stakeholders, have been effective in overcoming these challenges. Overall, the empowerment strategy applied in Baros Village has had a positive impact on improving the quality of life of the residents and strengthening community solidarity.

Keywords: Local Government Strategy, Rukun Warga Empowerment, P2RW Program, Sukabumi City.

PENDAHULUAN

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu aspek yang krusial dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Salah satu bentuk implementasi dari upaya tersebut adalah melalui program pemberdayaan rukun warga (P2RW) yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Program ini bertujuan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat partisipatif dan inklusif. Kelurahan Baros, yang terletak di Kota Sukabumi, merupakan salah satu wilayah yang aktif menerapkan program P2RW sebagai bagian dari strategi pembangunan daerah.

Dalam konteks ini, penting untuk memahami secara mendalam strategi yang diterapkan oleh pemerintah daerah dalam pelaksanaan program P2RW. Tepatnya di Kelurahan Baros Kota Sukabumi dilansir oleh media electronic yaitu Lingkarpna.id pada tanggal 21 Juli 2023 mengatakan bahwa Capaian pelaksanaan program pemberdayaan rukun warga (P2RW) dikelurahan baros hampir 100 persen dari perencanaan. Demikian disampaikan oleh lurah setempat, budi ruswani ketika meninjau hasil pembangunan P2RW di beberapa lokasi. “Alhamdulillah untuk P2RW hampir 100 persen, semua sudah terealisasi. Jenis pekerjaan bervariasi tergantung dari kebutuhan dan kearifan dari masing-masing wilayah tetapi semua sesuai dengan proposal” ia menegaskan untuk tahun ini P2RW dimanfaatkan oleh warga untuk beberapa jenis pembangunan seperti pengaspalan jalan sepanjang 325 meter di rw 04 serta pembanunan drainase dan tempat

penampungan sementara TPS di rw 02. Program P2RW ini haruslah sejalan dengan cita-cita yang diinginkan visi misi Kota Sukabumi yaitu menciptakan Kota Sukabumi menjadi kota yang memiliki insfrastruktur yang baik. Adapun pelaksanaan program tersebut harus dibarengi dengan strategi yang akurat demi berjalannya program tersebut.

Dilihat dari apa yang di sampaikan di atas bisa dikatakan bahwa dalam menjalankan suatu program harus dibarengi dengan pemahaman teori dan kajian teoritis. Adapun institusi yang bertanggung jawab dalam hal ini yaitu Pemerintah Kota Sukabumi dalam menjalankan program tersebut. Selain membuat menjalankan program tersebut Pemda juga harus mengontrol dan melihat kondisi yang sesuai dilapangan agar program itu bisa di implementasikan dengan baik

Dengan demikian, penelitian ini akan membahas secara komprehensif mengenai strategi pemerintah daerah dalam program P2RW di Kelurahan Baros Kota Sukabumi, serta implikasi kebijakan yang relevan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan efektivitas program pemberdayaan di tingkat lokal. Berdasarkan masalah-masalah yang ditemukan diatas peneliti tertarik untuk meneliti tentang Strategi Pemerintah Daerah dalam menjalankan program (P2RW)maka dari itu peneliti mengambil judul **“Strategi Pemerintah Daerah Dalam Program Pemberdayaan Rukun Warga (P2RW) Di Kelurahan Baros Kota Sukabumi.”**

METODE PENELITIAN

Penyusunan penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, sehingga dapat digunakan sebagai cara untuk mengungkapkan dan menelaah permasalahan dengan menggambarkan fenomena-fenomena yang terjadi berdasarkan fakta yang ada dilapangan. Penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya prilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik, dan dengan secara deskriptif dalam bentuk kata kata dan bahasa, pada suatu konteks khususnya yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode yang alamiah.

Metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini dipilih berdasarkan analisis dan pertimbangan untuk meneliti Strategi Pemerintah Daerah Dalam Program Pemberdayaan Rukun Warga (P2RW). Di Kelurahan Baros Kota Sukabumi. Secara mendalam dari fenomena yang terjadi dan memberikan gambaran, menjelaskan, mengidentifikasi beberapa hal yang dapat dijadikan tolak ukur untuk perbaikan selanjutnya.

PEMBAHASAN

Dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Rukun Warga (P2RW) menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk memberdayakan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Dengan melibatkan ketua RW dan tokoh masyarakat, Dinas PUPR berupaya memastikan bahwa program yang dirancang benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi warga setempat. Fokus pada penyediaan infrastruktur yang mendukung program P2RW menunjukkan perhatian pemerintah terhadap kebutuhan dasar masyarakat. Infrastruktur yang baik adalah fondasi bagi keberhasilan program pemberdayaan, karena mendukung aktivitas sehari-hari dan meningkatkan aksesibilitas layanan publik.

Pemetaan yang akurat memungkinkan pemerintah daerah untuk mengidentifikasi permasalahan utama yang dihadapi oleh setiap RW. Ini membantu dalam alokasi anggaran dan sumber daya yang lebih efisien, serta memastikan bahwa program yang dijalankan memiliki dampak yang signifikan terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat. Selain itu, pemetaan ini juga meminimalkan risiko kegagalan program akibat kurangnya informasi atau salah persepsi mengenai kebutuhan masyarakat.

Penyediaan infrastruktur yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat tidak hanya meningkatkan kualitas hidup, tetapi juga mempercepat proses pemberdayaan masyarakat. Misalnya, perbaikan jalan lingkungan dan saluran drainase tidak hanya memberikan manfaat langsung berupa kemudahan akses dan pengurangan risiko banjir, tetapi juga meningkatkan nilai ekonomi wilayah tersebut. Dengan standar pembangunan yang tinggi,

pemerintah juga berupaya untuk memastikan keberlanjutan infrastruktur sehingga manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang.

Dalam konteks keterbatasan anggaran, prioritas proyek menjadi sangat penting. Proyek yang dipilih harus berdasarkan kebutuhan mendesak dan dampaknya terhadap masyarakat. Ini memungkinkan penggunaan sumber daya yang terbatas secara optimal, menghindari pemborosan, dan memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan hasil yang nyata. Namun, pendekatan ini juga menuntut adanya mekanisme evaluasi yang transparan dan berbasis data untuk memastikan bahwa prioritas yang ditetapkan benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat. Selain itu, upaya mencari sumber pendanaan tambahan menunjukkan proaktivitas pemerintah daerah dalam mencari solusi jangka panjang untuk masalah pendanaan.

Partisipasi masyarakat adalah kunci keberhasilan program pemberdayaan. Sosialisasi yang intensif dan pelibatan aktif tidak hanya membantu dalam membangun kepercayaan masyarakat, tetapi juga memastikan bahwa program dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Forum-forum diskusi yang diadakan memberikan platform bagi masyarakat untuk menyuarakan pendapat dan keluhan mereka, yang kemudian dapat digunakan untuk memperbaiki dan menyesuaikan strategi pelaksanaan program. Hal ini mencerminkan pendekatan yang inklusif dan responsif, di mana pemerintah daerah benar-benar mendengarkan dan mempertimbangkan masukan dari masyarakat. Namun, tantangan dalam meningkatkan partisipasi mungkin termasuk kurangnya minat atau kesadaran di kalangan masyarakat tertentu, yang memerlukan upaya tambahan dalam edukasi dan komunikasi.

Melakukan analisis kebutuhan dan pemetaan masalah di setiap Rukun Warga (RW) adalah langkah awal yang krusial dalam merancang strategi yang efektif untuk Program Pemberdayaan Rukun Warga (P2RW). Dengan menggunakan metode seperti survei, diskusi kelompok, dan konsultasi dengan tokoh masyarakat serta ketua RW, pihak kami dapat mengumpulkan data yang mendalam dan komprehensif mengenai kondisi yang dihadapi

masyarakat. Informasi ini sangat penting untuk memahami kebutuhan spesifik dan tantangan yang ada, baik dalam hal infrastruktur, layanan publik, maupun masalah sosial.

Setelah analisis kebutuhan, penetapan tujuan dan sasaran yang spesifik, terukur, dan sesuai dengan prioritas masyarakat adalah langkah berikutnya yang penting. Tujuan dan sasaran yang jelas memberikan arah yang konkret bagi program P2RW dan memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan terfokus pada pemecahan masalah yang telah diidentifikasi. Penetapan ini juga memudahkan dalam mengukur pencapaian dan efektivitas program. Menyusun rencana program yang mencakup kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan, alokasi sumber daya, serta jadwal pelaksanaan adalah langkah kunci untuk memastikan implementasi yang efektif. Rencana ini harus disusun dengan melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk masyarakat, untuk memastikan bahwa program relevan dan dapat diterima dengan baik. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan membantu dalam meningkatkan dukungan dan partisipasi mereka dalam pelaksanaan program.

Rencana program yang terperinci dan inklusif memungkinkan pelaksanaan yang terorganisir dan terarah. Melibatkan berbagai pihak dalam perencanaan memastikan bahwa semua aspek kebutuhan dan harapan masyarakat diperhatikan. Namun, rencana yang terlalu kompleks atau tidak fleksibel dapat menyulitkan penyesuaian di lapangan jika terjadi perubahan kondisi atau kebutuhan. Oleh karena itu, penting untuk menjaga keseimbangan antara detail rencana dan fleksibilitas dalam pelaksanaannya.

Hambatan-hambatan strategi ini memerlukan perhatian khusus dan strategi penanganan yang tepat agar program-program di tingkat dinas dapat berjalan lancar dan mencapai tujuannya. Pendekatan yang sistematis, kepemimpinan yang kuat, perencanaan yang matang, serta komunikasi dan koordinasi yang baik antar berbagai pemangku kepentingan adalah kunci untuk mengatasi hambatan-hambatan ini. Salah satu hambatan utama adalah keterbatasan anggaran yang tersedia untuk melaksanakan program secara optimal. Dengan sumber daya yang terbatas, kami harus sangat

selektif dalam menentukan prioritas proyek yang akan dilaksanakan. Kadang-kadang, kebutuhan di lapangan lebih besar daripada anggaran yang tersedia, sehingga diperlukan penyesuaian dalam pelaksanaan program. Pelaksanaan program P2RW melibatkan banyak pihak dan instansi terkait. Koordinasi antar-instansi menjadi salah satu hambatan, terutama dalam hal sinkronisasi waktu dan sumber daya. Kadang-kadang, perbedaan prioritas atau jadwal kerja antara instansi dapat mengakibatkan penundaan dalam pelaksanaan program. Kondisi di lapangan sering kali berubah dengan cepat, baik itu karena faktor cuaca, kondisi geografis, atau perkembangan kebutuhan masyarakat. Dinamika ini menuntut fleksibilitas dalam pelaksanaan program, namun seringkali membutuhkan penyesuaian yang tidak terduga dalam strategi yang telah direncanakan sebelumnya

Dinas PUPR Kota Sukabumi menghadapi beberapa hambatan signifikan dalam pelaksanaan Program P2RW, termasuk keterbatasan anggaran, koordinasi antar-instansi yang kurang optimal, dan dinamika kondisi lapangan. Meskipun demikian, dengan strategi yang tepat dan fleksibilitas dalam penyesuaian program, hambatan-hambatan ini dapat diatasi. Analisis ini menekankan pentingnya perencanaan yang matang, koordinasi yang kuat, dan adaptabilitas dalam menghadapi tantangan untuk memastikan keberhasilan program pemerintah.

KESIMPULAN

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentang Strategi Pemerintahan Daerah Dalam Program Pemberdayaan Rukun Warga (P2RW) di Kelurahan Baros Kota Sukabumi. dalam pelaksanaannya sudah sepenuhnya efektif dan efisien. Maka dari itu dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam proses yang dilakukan sudah optimal hal ini karena masih terdapat berbagai permasalahan seperti;

1. Pengembangan Strategi yang Terstruktur: Dinas PUPR Kota Sukabumi mengembangkan strategi P2RW dengan pendekatan yang terstruktur, dimulai dari analisis kebutuhan dan pemetaan masalah di setiap Rukun Warga (RW). Proses ini melibatkan pengumpulan data yang komprehensif melalui survei, diskusi kelompok, dan konsultasi dengan tokoh masyarakat. Data ini digunakan untuk menetapkan tujuan dan sasaran yang spesifik dan sesuai dengan kebutuhan Masyarakat.
2. Partisipasi Masyarakat: Keterlibatan masyarakat dalam setiap tahap, dari perencanaan hingga evaluasi, merupakan prioritas dalam pelaksanaan program. Forum-forum musyawarah, pertemuan warga, dan mekanisme umpan balik digunakan untuk memastikan bahwa

kebijakan dan program sesuai dengan harapan masyarakat dan untuk meningkatkan dukungan terhadap program.

3. Arah Pengelolaan dan Implementasi Rencana program disusun dengan melibatkan berbagai pihak terkait dan mencakup alokasi sumber daya serta jadwal pelaksanaan yang terperinci. Selama implementasi, Dinas PUPR fokus pada koordinasi yang baik, pemantauan rutin, dan evaluasi berkala untuk memastikan efektivitas dan relevansi program.
4. Aksi, Konsistensi gagasan dalam menjalankan program di pemerintahan daerah, khususnya di tingkat dinas, merupakan elemen penting untuk keberhasilan dan kesinambungan program tersebut. Konsistensi ini memastikan bahwa ide-ide dasar, visi, dan tujuan yang telah dirumuskan sejak awal tetap diterapkan secara berkelanjutan. Dengan menjaga keselarasan antara langkah-langkah yang diambil dan gagasan awal, program dapat berjalan dengan lebih efektif dan memberikan hasil yang sesuai dengan yang diharapkan.
5. Pembelajaran, Penanganan Hambatan: Hambatan utama yang dihadapi meliputi keterbatasan anggaran, koordinasi antar-instansi, dan perubahan kondisi di lapangan. Untuk mengatasi hambatan ini, pmda melakukan optimalisasi anggaran, meningkatkan koordinasi, dan menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan yang berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aime Heene. (2010). *Manajemen Strategik Keorganisasian Publik*. Bandung : PT Refika Aditama.
- Bryson, John. M. (2007). *Perencanaan Strategis Bagi Organisasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Huger, J. D. (2003). *Manajemen Strategi*. Yogyakarta: PT. Andi.
- Marrus, K. (2002). *Desain Penelitian Manajemen Strategik*. Jakarta: Rajawali Press.
- Moleong . (2007). *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT, Remaja Rosdakarya.
- Mulgan, Geolff. (2009). *The arts of strategy mobilizing power and knowledge for the common goods*. Oxford University Press.
- Salusu, J. (2006). *Pengambilan Keputusan Stratejik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&B. Bandung : Alfabeta.

Suwarsono . (2012). Strategi Pemerintahan: Manajemen Organisasi Publik. Jakarta: Airlangga. Syafie. (2013). Pengantar Ilmu Pemerintahan . Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Winardi, J. (2003). Teori Organisasi dan Pengorganisasian. Jakarta: Raja Grafindo Persada.